



PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN *GINI RATIO* MELALUI *COMMON EFFECT MODEL*: STUDI KASUS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI PROVINSI JAWA TIMUR

*Chandra Julihandono Sj

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Surabaya

*Alamat Korespondensi: julihandono@kemenkeu.go.id

Abstract

The ultra micro financing (UMi) credit program constitutes one of the government's efforts to empower micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Ultra-micro entrepreneurs, who outnumber other business categories and contribute significantly to the local economy, are the target of this funding due to their limited access to capital finance. This study aims to examine the impact of UMi financing on the welfare of UMi debtors', with the goal of reducing poverty and inequality in East Java. Based on secondary data from the Ministry of Finance, this study uses a quantitative approach with panel data regression analysis. This study's findings that UMi financing enhances the economic value of debtors' enterprises, while its impact on reducing the gini ratio is limited, increased business turnover significantly contributes to lowering poverty levels. East Java poverty and population disparity are not significantly impacted by business assets. In the future, it is expected that UMi financing will be disbursed after updating the data on the number of ultra-micro entrepreneurs, and that the financing allocation ceiling will be increased to expand the reach of UMi financing distribution.

Abstrak

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan pinjaman yang dikenal sebagai pembiayaan ultra mikro (UMi). Pendanaan ini ditujukan untuk pengusaha ultra mikro yang jumlahnya lebih banyak dari kategori usaha lainnya dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah, namun akses kredit modalnya sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan UMi terhadap peningkatan kesejahteraan debitur UMi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan penduduk di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder dari Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan UMi meningkatkan nilai keekonomian usaha debitur dengan omzet usaha yang berpengaruh signifikan menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun tidak berpengaruh terhadap penurunan *gini ratio*. Aset usaha tidak berpengaruh signifikan bagi tingkat kemiskinan dan ketimpangan penduduk di Jawa Timur. Di masa mendatang, diharapkan pembiayaan UMi disalurkan setelah data jumlah pelaku usaha ultra mikro telah diperbarui dan pagu



alokasi pembiayaan dapat ditingkatkan untuk memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan UMi.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Pembiayaan, Ultra Mikro, UMi, UMKM

JEL Classification: D24, G32, O43

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah berlangsung di seluruh negara, termasuk Indonesia, selama dua tahun, sejak ditetapkan sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan Maret 2020. Pandemi tersebut tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan tapi juga pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian nasional melambat secara signifikan karena pembatasan secara ketat ruang gerak individu dan mobilitas kegiatan ekonomi sebagai upaya pencegahan perluasan penyebaran penyakit dan bertambahnya korban jiwa. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah tegas dan tepat untuk melindungi masyarakat namun sekaligus juga memulihkan perekonomian, khususnya sektor swasta dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Salah satu kebijakan strategis yang diambil Pemerintah adalah dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi bunga pinjaman dan pembiayaan usaha, termasuk pembiayaan ultra mikro (UMi). Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas pembiayaan UMi yang telah berjalan sejak tahun 2017. Jumlah pelaku usaha ultra mikro lebih banyak dibandingkan dengan kategori usaha lainnya seperti pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor riil. Selain itu kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka dengan tingkat aktivitas ekonomi rendah, dapat meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan penyaluran pembiayaan UMi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan sebagai wakil pemerintahan, melaksanakan survei yang mengukur sejauh mana pembiayaan UMi bermanfaat bagi para debitur yang menjalankan usaha ultra mikro. Nilai keekonomian pribadi (NKP) dan nilai keekonomian usaha (NKU) diukur dalam survei ini dalam dua tahap: survei awal dan survei akhir. Survei *baseline* mengukur kondisi debitur pada awal masa peminjaman, sedangkan survei *endline* mengukur perubahan nilai keekonomian debitur (NKD) setelah pelaku usaha ultra mikro mendapatkan pembiayaan.

Hasil survei tentang dampak pembiayaan UMi bagi perekonomian debitur masih belum dipublikasikan, sehingga belum diketahui secara pasti apakah pembiayaan UMi benar-benar meningkatkan kesejahteraan debitur dan berkontribusi pada perekonomian wilayah, terutama untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial (*gini ratio*). Temuan ini penting untuk dijadikan dasar dalam pengambilan

kebijakan penambahan alokasi anggaran dan perubahan skema pembiayaan UMi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan UMi terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan penduduk melalui peningkatan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data hasil survei *baseline* dan *endline* yang dilakukan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), DJPb pada tahun 2020 s.d. 2021, kesejahteraan diukur dari dampak pembiayaan UMi terhadap peningkatan omzet dan aset usaha debitur. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro dapat diasosiasikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang memadai dan komprehensif tentang salah satu program pemerintah dalam APBN yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM khususnya pelaku usaha ultra mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan penduduk. Peneliti akan melihat pengaruh pembiayaan UMi bagi peningkatan kesejahteraan debitur UMi dilihat dari NKU yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan penduduk di Jawa Timur selama tahun 2020 s.d. 2021.

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara peningkatan NKU debitur dengan penurunan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional

selama pandemi COVID-19. Selain itu, diharapkan anggaran penyaluran atau pembiayaan UMi ditingkatkan seiring bertambahnya para pengusaha sektor ultra mikro.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bisnis Ultra Mikro dianggap sebagai usaha mikro yang dimiliki oleh individu dan tidak memiliki kemudahan akses atau tidak dapat memperoleh penyaluran kredit dari sektor perbankan, atau disebut sebagai *nonbankable* karena memiliki kemampuan untuk beroperasi di bawah usaha mikro (Hia, Handaka, & Zega, 2021). Namun, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah sebuah bisnis produktif yang dimiliki oleh individu dengan aset tidak lebih dari Rp50 juta, dan omzet atau pendapatan tidak lebih dari Rp300 juta (Muttaqin & Hartono, 2019).

Sejak tahun 2017, pembiayaan UMi telah diberikan sesuai dengan PMK nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana diubah menjadi PMK nomor 95/PMK.05/2018. Selanjutnya, pada tahun 2020, diterbitkan PMK nomor 193/PMK.05/2020 dalam rangka simplifikasi dan peningkatan proses bisnis serta digitalisasi pembiayaan UMi.

Pembiayaan menurut Antonio (2001:160) dalam (Hia, Handaka, & Zega, 2021) adalah dana yang disediakan bagi pihak-pihak yang mengalami defisit modal, sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) dalam (Hia, Handaka, & Zega, 2021),

pembiayaan diartikan sebagai perwujudan rencana investasi melalui transfer dana antar pihak yang mana aktivitas dari investasi tersebut dilaksanakan sendiri dan/atau lembaga.

Adanya keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro atau ultra mikro mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman baik yang bersifat konvensional maupun syariah khusus bagi pelaku usaha ultra mikro (Menteri Keuangan, 2018) dalam (Hia, Handaka, & Zega, 2021). Melalui pembiayaan tersebut, diharapkan pertumbuhan UMKM tidak terhambat karena adanya kredit pinjaman oleh selain bank dan tidak ada persyaratan agunan/jaminan yang tinggi (Gupta et al., 2018) dalam (Hia, Handaka, & Zega, 2021).

Pemerintah menunjuk PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) pembiayaan UMi. Sesuai dengan PMK nomor 193/PMK.05/2020, PIP menaikkan fasilitas pembiayaannya untuk setiap debitur menjadi maksimal Rp20 juta, dengan penyaluran oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Salah satu LKBB yang saat ini memberikan dana kepada UMi adalah PT Pegadaian (Persero), PT BAV (Bahana Arta Ventura), dan PT PMN/Permodalan Nasional Madani (Persero). Anggaran penyaluran dapat berasal dari rupiah murni (RM), hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan/atau sumber lain yang sah dan resmi. Pendanaan kelompok tidak memiliki jaminan, sehingga risiko menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, tenor pinjaman bersifat jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 52 minggu. Pencairan pembiayaan tersebut kepada para debitur dilakukan secara

tunai dan/atau secara elektronik. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan UMi (debitur UMi) wajib diberikan pendampingan oleh LKBB sebagai mitra binaan untuk pengembangan usahanya. PIP menyalurkan ke LKBB terlebih dulu dengan pembebanan bunga 2-4% dan prosedur penyaluran pembiayaan UMi mengikuti mekanisme yang berlaku pada LKBB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kesejahteraan* berasal dari kata *aman*, yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (Poerwadarminta, 1999). *Catera*, yang berarti *payung*, adalah asal kata Sansekerta dari kata *sejahtera*. *Catera* dalam konteks kesejahteraan berarti orang yang hidupnya bebas dari keadaan miskin, bodoh, ketakutan, atau kecemasan sehingga mereka merasa aman dan tenteram secara lahir dan batin (Fahrudin, 2012) dalam (Purwana, 2014).

Kesejahteraan sosial atau masyarakat berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1998 (Suud, 2006), didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan sosial baik secara fisik (material) maupun nonfisik (spiritual) yang mencakup rasa perlindungan, nilai kesusilaan, dan kedamaian lahir dan batin. Ini memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sosial mereka secara optimal untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan mempertahankan hak dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan Pancasila. Menurut *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), istilah kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada individu

secara sistematis dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara bersamaan dengan kepentingan keluarga dan komunitas atau masyarakat (Suud, 2006).

Pengukuran kesejahteraan di Indonesia menggunakan delapan belas variabel yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, 2020) meliputi indikator penduduk yaitu laju pertumbuhan penduduk (LPP), kepadatan penduduk per KM (KPP), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH), indikator penghasilan yaitu pengeluaran per kapita (PPK), persentase rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan (PKM), indikator rumah tangga yaitu persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas minum sendiri (FMS), persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah (LBT), persentase rumah tangga dengan luas lantai <20 M² (LLK), persentase rumah tangga dengan dinding tembok (RDT), persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari PLN (PLN), persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri (BAB), indikator kesejahteraan dan pengangguran yaitu persentase penduduk miskin (RTM), jumlah pengangguran terbuka (JPT), persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu (PKK), persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan dan kegiatannya terganggu (PBB) dan jumlah penduduk bekerja (JPB).

Beberapa variabel tersebut yang bisa disamakan sebagai dasar

pengukuran kesejahteraan masyarakat berada di survei *baseline* dan *endline* Direktorat SMI. Variabel tersebut meliputi AHH sebagai dimensi Kesehatan, AMH dan RLS sebagai dimensi Pendidikan, LBT, LLK, dan BAB sebagai dimensi standar hidup. Selain itu, terdapat variabel PKM, PLN, serta kepemilikan kendaraan operasional dan nilai tabungan sebagai acuan pengukuran nilai keekonomian pribadi dalam survei. Untuk NKU atau nilai keekonomian usaha sendiri diukur berdasarkan variabel nilai aset untuk usaha dan omzet selama satu tahun, termasuk jumlah karyawan yang digaji debitor UMi.

Survei *baseline* merupakan pengukuran NKD yang dilakukan oleh kuasa bendahara umum negara yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi di bawah DJPb yang didampingi penyalur pembiayaan UMi. Survei bertujuan untuk mengetahui kondisi debitor saat awal masa peminjaman pembiayaan UMi dan survei dilakukan kepada sampel debitor terpilih pada setiap semesternya (Dit.SMI, DJPb, 2021).

Survei *endline* merupakan pengukuran NKD yang dilakukan oleh KPPN didampingi penyalur pembiayaan UMi bertujuan untuk mengetahui perubahan NKD setelah mendapatkan peminjaman pembiayaan UMi dan survei dilakukan kepada sampel debitor terpilih yang telah dilakukan survei *baseline* pada semester yang sama periode sebelumnya. Pada masa pandemi Covid-19, baik survei *baseline* dan *endline* dilakukan secara jarak jauh yaitu melalui panggilan telepon dan jumlah pertanyaan dikurangi dari

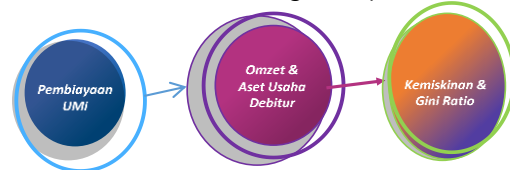
sebelumnya 48 pertanyaan menjadi 21 pertanyaan yang terkait indikator-indikator utama dalam pengukuran NKD dan telah mengadopsi indikator pengukuran tingkat kemiskinan Masyarakat (Dit.SMI, DJPb, 2021).

Kemiskinan secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan material baik berupa barang atau layanan yang dibutuhkan (Spicker, 2007). Sementara itu, menurut Bank Dunia, kemiskinan didasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat dan merupakan satu indikator penting dalam menilai pembangunan yang berhasil (Musiyan, 1992).

United Nation Development Programme (UNDP) memperkenalkan ukuran kemiskinan berdasarkan kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, dan kondisi kesehatan (Suryawati, 2005). Kemiskinan adalah kondisi kekurangan materi atau memiliki standar hidup rendah dibandingkan dengan standar kehidupan masyarakat pada umumnya (Suparlan, 1995). BPS menyatakan bahwa kemiskinan merujuk pada kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan esensial/dasar seperti makanan dan bukan makanan yang diukur dari aspek pengeluaran. Seseorang dianggap sebagai miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dimiliki di bawah garis kemiskinan.

Gini Ratio sebagai alat perbandingan ukuran ketimpangan pengeluaran atas pendapatan dan memiliki nilai pada rentang antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

Indeks ketimpangan (*Gini Ratio*) merupakan satu metode statistik dalam mengukur ketimpangan penghasilan, ditunjukkan secara geometris sehingga dapat menyajikan dua elemen yang terdiri dari visualisasi kurva Lorenz dan analisis matematis (Heryanah, 2017).

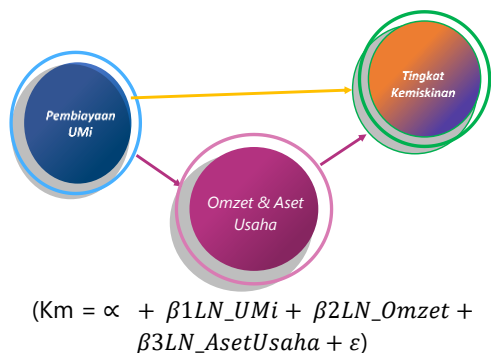
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan kepada para debitur UMi di Jawa Timur yang telah dilakukan survei *baseline* dan *endline* oleh KPPN pada semester I tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021. Penelitian dimaksudkan untuk melihat pengaruh penyaluran pembiayaan UMi terhadap peningkatan kesejahteraan debitur UMi melalui peningkatan NKU untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan penduduk (*gini ratio*) di Jawa Timur, sebagaimana kerangka berpikir pada Gambar 1.

Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan informasi relevan dan valid untuk menjawab masalah penelitian secara empiris melalui informasi resmi dari pihak terkait yang sudah diuji kebenarannya serta berasal dari penelitian terdahulu sebagai data pendukung dalam memperkuat analisis pembahasan.

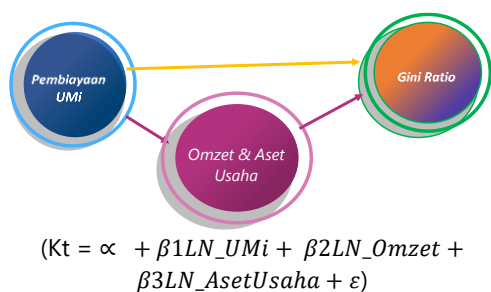
Pelaksanaan pengumpulan data bersifat ilmiah sesuai ketentuan pelaksanaan survei penyaluran pembiayaan UMi dengan menerapkan metode telaah pengaruh pembiayaan UMi bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro

Gambar 2 Model Persamaan 1



Sumber: Diolah peneliti

Gambar 3 Model Persamaan 2



Sumber: Diolah peneliti

untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan *gini ratio* di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan *common effect model (CEM)* yaitu *pooled least square (PLS)* melalui persamaan model penelitian sebagaimana Gambar 2 dan 3.

Common effect model (CEM) adalah metode permodelan paling dasar dalam penelitian ilmiah melalui regresi data panel (kombinasi data silang dengan data runtut waktu) dengan menggunakan prinsip *ordinary least square (OLS)* atau kuadrat terkecil, sehingga teknik ini sering disebut dengan istilah *pooled least square (PLS)* (Mudrajad, 2003).

Metode tersebut yang paling sederhana di antara dua model lainnya yaitu *fixed effect model (FEM)* dan *random effect model (REM)* serta mempunyai *intercept* yang tetap dan tidak bervariasi secara acak (Mudrajad, 2003).

Regresi data panel akan berlaku sepanjang waktu pada seluruh unit pengamatan (Winarno, 2017). Hal ini serupa dengan pernyataan bahwa CEM memiliki hasil perilaku data yang sama pada berbagai kurun waktu sehingga konsisten (Widarjono, 2009).

Koefisien dalam regresi data panel meliputi: 1) Koefisien merupakan koefisien beta regresi panel data sesuai variabel yang tercantum dalam kolom variabel; 2) *Standard Error* adalah nilai koefisien yang tercantum pada kolom koefisien; 3) *t-statistics* adalah nilai *t*-parsial regresi panel data sesuai variabel pada kolom variabel; 4) Prob adalah nilai *p-value* atau tingkat signifikansi dari *t*-parsial di kolom *t-statistics* yang digunakan untuk menguji hipotesis uji parsial (Ghozali, 2016).

Data diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti jurnal ilmiah, publikasi Kementerian Keuangan, dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) DJPb. Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisis dengan aplikasi STATA (Statistika dan Data) untuk dilakukan analisis regresi data panel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proporsi Pelaku Usaha di Indonesia dan Jumlah UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data sekunder pada Tabel 1, pelaku usaha di Indonesia pada

tahun 2019 sebagian besar terdiri dari usaha mikro, yang mencapai 98,67% dari total 65.469.701 unit. Usaha kecil hanya menyumbang 1,22%, sedangkan usaha menengah dan besar masing-masing berkontribusi sebesar 0,11% dan 0,01%. Angka-angka ini menegaskan pentingnya peran usaha mikro dalam ekonomi nasional, terutama sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, dengan kontribusi terhadap 109,84 juta lapangan kerja atau sekitar 89,04% dari total tenaga kerja.

Di Jawa Timur pada tahun 2021 berdasarkan Tabel 2, usaha mikro juga menjadi dominan, mencakup 93,37% dari total 9.782.262 unit UMKM, diikuti oleh usaha kecil sebesar 5,92% dan usaha menengah sebesar 0,70%. Pola ini mencerminkan tren nasional, meskipun proporsi usaha kecil dan menengah di Jawa Timur tahun 2021 relatif lebih tinggi dibandingkan data nasional tahun 2019 (1,22% dan 0,11%). Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi lebih besar dalam

mengembangkan usaha kecil dan menengah. Namun, tantangan utama tetap pada dominasi usaha mikro, terutama mengingat laporan BRI Research Institute yang menyebutkan bahwa 30 juta pelaku usaha ultra mikro di Indonesia belum terjangkau layanan keuangan formal, sehingga diperlukan upaya lebih dalam mendukung keberlanjutan dan inklusi keuangan sektor ini.

Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari SIKP Kementerian Keuangan per 27 April 2022, total penyaluran pembiayaan UMi di Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2022 adalah sebesar Rp2.975,24 miliar kepada 918.914 debitur. Untuk tahun 2022, PIP Kemenkeu memproyeksikan penyaluran pembiayaan UMi meningkat menjadi 2 juta debitur yang salah satunya menyasar pelaku usaha ultra mikro di Jawa Timur.

Tabel 1 Proporsi Pelaku Usaha di Indonesia Tahun 2019

Kategori usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Proporsi
Besar	5.637 unit	0,01%
Menengah	65.465 unit	0,01%
Kecil	798.679 unit	1,22%
Mikro	64.600.000 unit	98,67%
Total	65.469.781 unit	

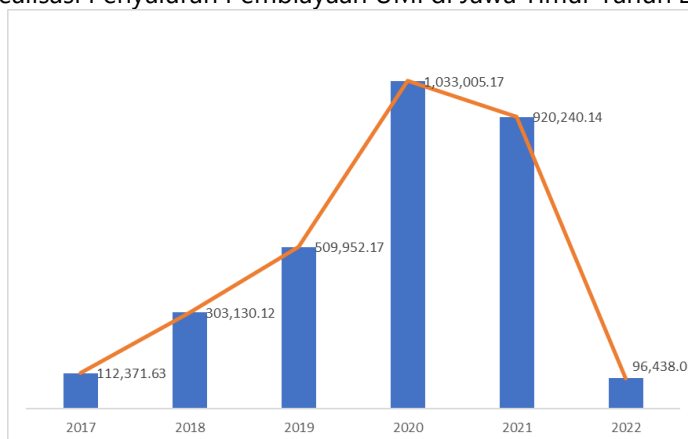
Sumber: dataindonesia.id, 2022

Tabel 2 Proporsi UMKM di Jawa Timur Tahun 2021

Kategori usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Proporsi
Menengah	68.835 unit	0,70%
Kecil	579.567 unit	5,92%
Mikro	9.133.859 unit	93,37%
Total	9.782.262 unit	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 4 Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi di Jawa Timur Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber: Bidang PPA II, Kanwil DJPb Jawa Timur, 2022 (Diolah peneliti)

Tabel 3 Statistika Deskriptif Debitur UMi Tahun 2020 s.d. 2021

Variable	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
ID_Responden	0				
Daerah	75	9.32	5.635697	1	20
Tahun	75	2020.48	.5029642	2020	2021
Akad_UMiX	75	5080000	2678796	1500000	1.00e+07
Aset_UsahaY1	75	1.56e+07	1.83e+07	60000	1.00e+08
OmzetY2	75	2.01e+08	4.15e+08	1776000	3.36e+09
LabaY3	75	5.95e+07	1.58e+08	-3.36e+07	1.34e+09
KmY4	75	10.83853	3.766952	5.02	18.91
KtY5	75	.3320533	.0188249	.292	.373

Sumber: Diolah peneliti

Rincian penyaluran pembiayaan UMi di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2018 s.d. 2022 (per 27 April 2022) sebagaimana tersaji pada Gambar 4.

Peningkatan Kesejahteraan Debitur UMi Berdasarkan Hasil Survei *Baseline* dan *Endline* di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2020 s.d. 2021)

Berdasarkan data dari SIKP Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021 yang dipublikasikan oleh Direktorat SMI dalam laporan kajian uji dampak pembiayaan ultra mikro, hasil analisis atas data *baseline* semester II 2019-data *endline* semester

II 2020 dan data *baseline* semester I 2020-data *endline* semester I 2021, dapat diketahui hasil peningkatan kesejahteraan berdasarkan NKU berupa peningkatan nilai omzet dan aset usaha tahunan para debitur UMi sebagaimana tersaji di Lampiran 1.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran deskriptif atas seluruh sampel, telah dilaksanakan dalam penelitian ini sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 4 Regresi Data Panel Pembiayaan UMi terhadap Omzet Tahunan Debitur UMi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	35.248454	1	35.248454	F(1, 73)	=	18.33
Residual	140.353062	73	1.92264469	Prob > F	=	0.0001
				R-Squared	=	0.2007
				Adj R-Squared	=	0.1898
Total	175.601516	74	2.37299346	Root MSE	=	1.3866

Inomzet	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
InUMi	1.286214	.3003951	4.28	0.000	.6875277	1.884901
_cons	-1.549098	4.599571	-0.34	0.737	-10.71603	7.617834

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 5 Regresi Data Panel Pembiayaan UMi terhadap Aset Usaha Debitur UMi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	25.241398	1	25.241398	F(1, 73)	=	11.69
Residual	157.682916	73	2.16003995	Prob > F	=	0.0010
				R-Squared	=	0.1380
				Adj R-Squared	=	0.1262
Total	182.924314	74	2.47195019	Root MSE	=	1.4697

InAsetUsaha	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
InUMi	1.088429	.3184008	3.42	0.001	.4538568	1.723001
_cons	-.8934186	4.87527	-0.18	0.855	-10.60982	8.822981

Sumber: Diolah peneliti

Hasil Uji *Pooled Least Square* (PLS)

PLS digunakan untuk pengujian pengaruh pembiayaan UMi terhadap NKU dan NKU terhadap tingkat kemiskinan dan *gini ratio* di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020 s.d. 2021.

Hasil analisis regresi data panel dengan penerapan metode CEM yaitu PLS dengan aplikasi STATA pada NKU hasil survei *baseline* dan *endline* debitur UMi terhadap tingkat kemiskinan dan *gini ratio* di Jawa Timur, telah dilaksanakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Sebagaimana tersaji pada Tabel 4, diketahui bahwa peningkatan omzet usaha selama setahun dapat dijelaskan oleh pembiayaan UMi sebesar 20,07%, sedangkan sisanya sebesar 79,93%

dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan variabel pembiayaan UMi signifikan terhadap variabel omzet tahunan debitur UMi dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001, nilai *R-squared* sebesar 0,2007 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,1898 serta nilai koefisien pembiayaan UMi sebesar 1,286214, sehingga disimpulkan bahwa setiap 1% pembiayaan UMi dapat meningkatkan omzet tahunan debitur UMi sebesar 1,286%.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pembiayaan UMi sebesar 13,80% bertanggung jawab atas peningkatan aset usaha setiap tahun. Jumlah sisa sebesar 86,20% dapat dijelaskan dengan

Tabel 6 Regresi Data Panel Omzet Usaha Debitur UMi terhadap Tingkat Kemiskinan

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	174.07353	2	87.0367648	F(2, 72)	=	7.15
Residual	875.981009	72	12.1664029	Prob > F	=	0.0015
				R-Squared	=	0.1658
				Adj R-Squared	=	0.1426
Total	1050.05454	74	14.1899262	Root MSE	=	3.488

KmY4	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnOmzet	-1.091522	.2944219	-3.71	0.000	-1.678442	-.504603
lnUMi	.8367612	.8452351	0.99	0.326	-.8481842	2.521707
_cons	17.82676	11.5794	1.54	0.128	-5.256352	40.90987

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 7 Regresi Data Panel Omzet Usaha Debitur UMi terhadap *Gini Ratio*

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	.00092906	2	.00046453	F(2, 72)	=	1.32
Residual	.025294727	72	.000351316	Prob > F	=	0.2729
				R-Squared	=	0.0354
				Adj R-Squared	=	0.0086
Total	.026223787	74	.000354375	Root MSE	=	.01874

KtY5	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnOmzet	.00244479	.0015821	1.55	0.126	-.000706	.0056018
lnUMi	-.0051813	.004542	-1.14	0.258	-.0142356	.0038729
_cons	.3669529	.0622234	5.90	0.000	.2429128	.490993

Sumber: Diolah peneliti

variabel lain yang tidak termasuk dalam metode penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel aset usaha debitur UMi lebih signifikan daripada variabel pembiayaan UMi. Dengan nilai probabilitas 0,0010, nilai *R-squared* 0,1380, dan nilai *R-squared* yang disesuaikan 0,1262, dan nilai koefisien pembiayaan UMi 1,088429, dapat disimpulkan bahwa setiap 1% pembiayaan UMi dapat meningkatkan aset usaha debitur UMi sebesar 1,088%.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pembiayaan UMi dan omzet usaha tahunan debitur UMi sebesar 16,58% menentukan tingkat kemiskinan selama

setahun pembiayaan UMi. Variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini dapat menjelaskan sisa sebesar 83,43%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan penduduk dipengaruhi secara signifikan oleh variabel omzet usaha tahunan debitur UMi. Hasilnya menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0015, nilai *R-squared* sebesar 0,1658, nilai *R-squared* yang disesuaikan sebesar 0,1426, dan nilai koefisien pembiayaan UMi sebesar -1,091522. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap 1% peningkatan omzet usaha tahunan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 8 Regresi Data Panel Aset Usaha Debitur UMi terhadap Tingkat Kemiskinan

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	12.7358271	2	6.36791354	F(2, 72)	=	0.44
Residual	1037.31871	72	14.4072043	Prob > F	=	0.6445
				R-Squared	=	0.0121
				Adj R-Squared	=	-0.0153
Total	1050.05454	74	14.1899262	Root MSE	=	3.7957

KmY4	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnAset	.1931372	.3022717	0.64	0.525	-.4094305	.7957049
lnUMi	-.7773864	.8856793	-0.88	0.383	-2.542956	.9881831
_cons	19.69019	12.59382	1.56	0.122	-5.415138	44.79551

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 9 Regresi Data Panel Aset Usaha Debitur UMi terhadap *Gini Ratio*

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	75
Model	.000093078	2	.000046539	F(2, 72)	=	0.13
Residual	.026130709	72	.000362927	Prob > F	=	0.8798
				R-Squared	=	0.0035
				Adj R-Squared	=	-0.0241
Total	.026223787	74	.000354375	Root MSE	=	.01905

KmY4	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnOmzet	-.0001786	.0015171	-0.12	0.907	-.0032029	.0028457
lnUMi	-.0018385	.004452	-0.41	0.680	-.0106999	.007023
_cons	.3630013	0.632087	5.74	0.000	.236997	.4890056

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 7 menunjukkan bahwa pembiayaan UMi dan omzet usaha tahunan debitur UMi sebesar 3,54% menyumbang *gini ratio* selama setahun, sedangkan sisanya sebesar 96,46% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam metode penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel omzet usaha tahunan debitur UMi tidak signifikan terhadap variabel *gini ratio*. Dengan nilai probabilitas 0,2729, nilai *R-squared* 0,0354, nilai *R-squared* yang disesuaikan 0,0086, dan nilai koefisien pembiayaan UMi 0,0024479, dapat disimpulkan bahwa *gini ratio* akan meningkat 0,002% setiap 1% peningkatan omzet usaha tahunan.

Pembiayaan UMi terbukti signifikan dalam meningkatkan omzet usaha dan aset usaha debitur. Hal ini menunjukkan bahwa program pembiayaan mikro mampu memberikan modal yang cukup bagi usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pengaruhnya lebih besar terhadap omzet dibandingkan aset, mencerminkan bahwa debitur cenderung menggunakan dana untuk mendukung aktivitas usaha langsung (misalnya, produksi atau pemasaran) dibandingkan investasi jangka panjang.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pembiayaan UMi dan aset usaha debitur UMi sebesar 1,21% menjelaskan tingkat kemiskinan tahunan pembiayaan UMi.

Variabel lain di luar model penelitian ini dapat menjelaskan sisa 98,79%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel aset usaha debitur UMi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,6445, nilai *R-squared* sebesar 0,0121, nilai *R-squared* yang disesuaikan sebesar -0,0153, dan nilai koefisien pembiayaan UMi sebesar 0,1931372, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan aset usaha akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,193%.

Tabel 9 menunjukkan bahwa pembiayaan UMi dan aset usaha debitur UMi sebesar 0,35% dapat bertanggung jawab atas *gini ratio* selama setahun, sedangkan sisanya sebesar 99,65% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terkait dengan metode penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gini rasio tidak signifikan terhadap variabel aset usaha debitur UMi. Dengan nilai probabilitas 0,8798, nilai *R-squared* 0,0035, nilai *R-squared* yang disesuaikan 0,00241, dan nilai koefisien pembiayaan UMi -0,0001786, dapat disimpulkan bahwa gini rasio akan turun 0,000% setiap 1% peningkatan aset usaha.

Omzet usaha yang meningkat dari pembiayaan UMi memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara peningkatan pendapatan usaha dengan kesejahteraan masyarakat, di mana usaha mikro memberikan kontribusi ekonomi bagi rumah tangga. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak ini

hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor penurunan kemiskinan, yang mengindikasikan perlunya pendekatan holistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur *review*, berita, dan data survei, serta beberapa referensi dan penggunaan STATA, penelitian ini menemukan bahwa penyaluran pembiayaan UMi dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha UMi yang menjadi debitur UMi di Provinsi Jawa Timur. NKU yang dihasilkan dari penggunaan UMi dapat meningkat. NKU yang dilihat berdasarkan omzet tahunan dan aset usaha ternyata berkorelasi terhadap tingkat kemiskinan dan *gini ratio* di Jawa Timur.

Omzet tahunan berpengaruh secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan dan tidak signifikan menaikkan *gini ratio*. Untuk aset usaha terbukti tidak signifikan menaikkan tingkat kemiskinan dan tidak signifikan menurunkan *gini ratio* debitur UMi di Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2018 hingga 2022, jumlah penyaluran pembiayaan UMi dan jumlah pelaku usaha ultra mikro yang menjadi debitur UMi meningkat di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pembiayaan UMi sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha ultra mikro, yang berkontribusi besar pada perekonomian sektor riil.

Saran

Penyaluran pembiayaan UMi melalui penyalur LKBB hendaknya didasarkan pada data jumlah pelaku

usaha ultra mikro yang valid dan akurat melalui survei secara langsung baik oleh para penyalur maupun pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait.

Perikatan dengan para debitur dan penyaluran pembiayaan UMi juga hendaknya dilakukan segera di awal tahun sehingga pembiayaan UMi berdampak lebih besar pada perekonomian debitur.

Besaran atau maksimal pembiayaan juga hendaknya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan nilai keekonomian usaha dalam meningkatkan kesejahteraan debitur dan memberi kesempatan bagi penyerapan lebih banyak tenaga kerja yang lebih luas dan dapat menghindarkan para debitur dari risiko terjerat rentenir serta perluasan wilayah penyaluran terutama pada wilayah-wilayah yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Penelitian ini berimplikasi praktis bagi Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan pemantauan dan penilaian secara rutin atau berkala atas pembiayaan ultra mikro dan dapat mengukur dampak dari kebijakan pembiayaan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha ultra mikro. Selain itu, implikasi lainnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan untuk keberlanjutan dan peningkatan pagu alokasi dan kemudahan penyaluran pembiayaan UMi tersebut di tahun-tahun berikutnya.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya melihat pengaruh program penyaluran pembiayaan UMi terhadap kesejahteraan debitur (pelaku usaha ultra mikro) di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data hasil survei *baseline* dan *endline* untuk NKU saja tanpa melihat NKP dikarenakan belum tergambar secara akurat peningkatan kesejahteraan berdasarkan variabel kesejahteraan individu atau pribadi. Arsip data yang telah dikumpulkan hanya tersedia dan terbatas pada informasi-informasi atau laporan berkala yang sah dan berita yang saling berkaitan pada media resmi. Selain itu juga belum tersedia data yang valid terkait jumlah terkini pelaku usaha ultra mikro di Jawa Timur baik yang sudah mendapatkan pembiayaan UMi maupun yang belum.

Adanya pandemi COVID-19 menjadikan jumlah sampel survei debitur UMi sebagai data sekunder pada penelitian ini menjadi lebih sedikit dikarenakan survei dilakukan secara jarak jauh yang berbeda dibandingkan pada saat kondisi sebelum pandemi. Tidak bersedianya debitur UMi untuk disurvei dan nomor telepon yang sudah tidak aktif menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan survei *baseline* dan *endline* debitur UMi selama pandemi COVID-19. Di satu sisi, terdapat satu KPPN yaitu KPPN Pamekasan yang tidak melaksanakan survei *baseline* dan *endline* di tahun 2020 s.d. 2021 dan terdapat data hasil survei yang memiliki nilai omzet tahunan dan aset usaha sebesar nol sehingga harus dihilangkan atau dihapus dalam baris data perhitungan regresi data panel pada aplikasi STATA.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, mendalam, dan terkini untuk membantu pengambilan keputusan tentang besaran pagu pembiayaan UMi, penulis menyarankan untuk melakukan survei atau penelitian pendahuluan terlebih dahulu mengenai jumlah pelaku usaha ultra mikro yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Jumlah sampel survei *baseline* dan *endline* harus diambil secara langsung oleh seluruh KPPN. Penelitian berikutnya dapat mengkaji indikator atau variabel lain yang relevan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan bagi debitur UMi sebagai dampak pembiayaan UMi dari pemerintah.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini ratio Maret 2024*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>
- Dit.SMI, DJPb. (2021). *Kajian uji dampak pembiayaan ultra mikro: Hasil analisis atas data baseline semester II 2019-data endline semester I 2020 dan data baseline semester I 2020-data endline semester I 2021*. Jakarta: Dit.SMI, DJPb.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*.
- Heryanah, H. (2017). Kesenjangan pendapatan di Indonesia: Berdasarkan susenas 2008, 2011, dan 2013. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 16.
- Hia, V. D., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh pembiayaan ultra mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75-84.
- Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, U. K. (2020, Agustus 31). *Pengukuran indikator kesejahteraan*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/hmpsepunpar/5f4c950b1184092c42283ef4/pengukuran-indikator-kesejahteraan-masyarakat>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pembiayaan ultra mikro*. Retrieved from www.jdih.kemenkeu.go.id: www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis*.
- Mahdi, M. I. (2022, Januari 19). *Berapa jumlah UMKM di Indonesia*. Retrieved from dataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Mudrajad, K. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Musiyam, M. (1992). *Kemiskinan di Indonesia: Konsep, pendekatan, dan strategi pengentasan*. Forum Geografi.
- Muttaqin, A., & Hartono, A. (2019). Implementasi penerapan pembiayaan ultra mikro di BMT-UGT Sidogiri. *Journal of Islamic Economics and Business*, 273-299.

- Poerwadarminta, W. (1999). *Dalam kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwana, A. (2014). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Justicia Islamica. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 21-42.
- Spicker. (2007). *The idea of poverty*.
- Suparlan, P. (1995). *Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*.
- Suud, M. (2006). *Tiga organisasi kesejahteraan sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.

Lampiran 1 Nilai Keekonomian Usaha (NKU) Debitur UMi di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 s.d. 2021

ID_Responden	Daerah	Tahun	Akad_UMi (X)	Aset_Usaha (Y1)	Omzet (Y2)	Laba (Y3)
202001-0003	Kab Tuban	2020	2,000,000	20,000,000	235,200,000	67,200,000
202001-0007	Kab Blitar	2020	4,000,000	7,000,000	43,200,000	(14,400,000)
202001-0018	Kab Gresik	2020	6,000,000	5,000,000	100,800,000	33,600,000
202001-0027	Kab Tuban	2020	4,000,000	10,000,000	1,776,000	480,000
202001-0028	Kab Nganjuk	2020	5,000,000	50,000,000	403,200,000	134,400,000
202001-0042	Kab Mojokerto	2020	5,000,000	20,000,000	67,200,000	33,600,000
202001-0047	Kab Nganjuk	2020	3,000,000	200,000	16,800,000	8,400,000
202001-0050	Kab Sidoarjo	2020	10,000,000	28,000,000	129,600,000	43,200,000
202001-0052	Kab Probolinggo	2020	5,500,000	15,000,000	24,000,000	14,400,000
202001-0061	Kab Sidoarjo	2020	6,000,000	20,000,000	129,600,000	28,800,000
202001-0075	Kab Bojonegoro	2020	4,000,000	250,000	5,040,000	4,704,000
202001-0093	Kab Sidoarjo	2020	10,000,000	15,000,000	144,000,000	60,000,000
202001-0106	Kab Banyuwangi	2020	4,500,000	5,000,000	100,800,000	33,600,000
202001-0123	Kab Lumajang	2020	3,000,000	1,500,000	23,520,000	6,720,000
202001-0145	Kota Surabaya	2020	2,000,000	1,850,000	252,000,000	58,800,000
202001-0150	Kab Pacitan	2020	3,500,000	1,000,000	43,200,000	14,400,000
202001-0157	Kab Bojonegoro	2020	3,000,000	2,000,000	50,400,000	16,800,000
202001-0158	Kab Kediri	2020	3,000,000	3,000,000	151,200,000	50,400,000
202001-0159	Kab Tuban	2020	1,500,000	10,000,000	3,199,968	1,866,624
202001-0163a	Kab Situbondo	2020	10,000,000	30,000,000	504,000,000	168,000,000
202001-0176	Kab Bojonegoro	2020	2,000,000	5,000,000	50,400,000	16,800,000
202001-0179	Kab Ngawi	2020	10,000,000	20,000,000	33,600,000	6,720,000
202001-0184	Kab Jember	2020	3,000,000	20,000,000	84,000,000	-
202001-0187	Kab Tuban	2020	5,000,000	10,000,000	33,600,000	16,800,000
202001-0193	Kab Nganjuk	2020	4,000,000	60,000,000	93,072,000	55,776,000
202001-0213	Kab Lamongan	2020	7,000,000	10,000,000	57,600,000	28,800,000
202001-0216	Kab Sidoarjo	2020	8,000,000	25,000,000	36,000,000	12,000,000
202001-0231	Kab Kediri	2020	2,000,000	1,200,000	3,360,000	560,112
202001-0266	Kab Banyuwangi	2020	4,000,000	11,000,000	403,200,000	67,200,000
202001-0280	Kota Surabaya	2020	3,000,000	2,070,000	168,000,000	33,600,000
202001-0163b	Kab Situbondo	2020	10,000,000	40,000,000	504,000,000	168,000,000
202001-0291	Kab Jombang	2020	6,000,000	5,000,000	168,000,000	67,200,000
202001-0292	Kab Malang	2020	7,000,000	5,000,000	432,000,000	144,000,000
202001-0301	Kab Banyuwangi	2020	3,000,000	7,500,000	84,000,000	16,800,000
202001-0304	Kab Sidoarjo	2020	3,000,000	12,000,000	38,400,000	9,600,000
202001-0320	Kota Surabaya	2020	2,000,000	60,000	14,400,000	4,320,000
202001-0321	Kab Banyuwangi	2020	7,000,000	25,000,000	192,000,000	96,000,000
202001-0328	Kota Surabaya	2020	3,000,000	700,000	100,800,000	14,400,000
202001-0334	Kab Pasuruan	2020	10,000,000	100,000,000	288,000,000	144,000,000
202001-0106	Kab Banyuwangi	2021	4,500,000	5,000,000	235,200,000	67,200,000
202001-0028	Kab Nganjuk	2021	5,000,000	50,000,000	705,600,000	201,600,000
202001-0163a	Kab Situbondo	2021	10,000,000	30,000,000	504,000,000	168,000,000
202001-0042	Kab Mojokerto	2021	5,000,000	10,000,000	50,400,000	16,800,000
202001-0050	Kab Sidoarjo	2021	10,000,000	7,000,000	216,000,000	72,000,000
202001-0157	Kab Bojonegoro	2021	3,000,000	2,000,000	25,200,000	8,400,000
202001-0159	Kab Tuban	2021	1,500,000	15,000,000	24,000,000	4,800,000

Lampiran 1 Nilai Keekonomian Usaha (NKU) Debitur UMi di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 s.d. 2021 (Lanjutan)

ID_Responden	Daerah	Tahun	Akad_UMi (X)	Aset_Usaha (Y1)	Omzet (Y2)	Laba (Y3)
202001-0280	Kota Surabaya	2021	3,000,000	15,000,000	168,000,000	50,400,000
202001-0328	Kota Surabaya	2021	3,000,000	25,000,000	218,400,000	50,400,000
202001-0292	Kab Malang	2021	7,000,000	8,000,000	100,800,000	33,600,000
202001-0187	Kab Tuban	2021	5,000,000	21,000,000	268,800,000	33,600,000
202001-0150	Kab Pacitan	2021	3,500,000	3,000,000	24,000,000	12,000,000
202001-0123	Kab Jember	2021	3,000,000	20,000,000	84,000,000	-
202001-0231	Kab Kediri	2021	2,000,000	2,000,000	4,032,000	672,000
202001-0176	Kab Bojonegoro	2021	2,000,000	5,000,000	33,600,000	(33,600,000)
202001-0220	Kab Bojonegoro	2021	4,500,000	150,000	13,440,000	5,040,000
202001-0047	Kab Nganjuk	2021	3,000,000	2,000,000	8,400,000	5,040,000
202001-0018	Kab Gresik	2021	6,000,000	6,000,000	100,800,000	33,600,000
202001-0291	Kab Jombang	2021	6,000,000	5,000,000	302,400,000	33,600,000
202001-0321	Kab Banyuwangi	2021	7,000,000	35,000,000	1,008,000,000	-
202001-0193	Kab Nganjuk	2021	4,000,000	60,000,000	100,800,000	60,480,000
202001-0027	Kab Tuban	2021	4,000,000	12,000,000	2,880,000	1,200,000
202001-0075	Kab Bojonegoro	2021	4,000,000	250,000	2,856,000	(504,000)
202001-0163b	Kab Situbondo	2021	10,000,000	40,000,000	504,000,000	168,000,000
202001-0093	Kab Sidoarjo	2021	10,000,000	1,000,000	252,000,000	84,000,000
202001-0061	Kab Sidoarjo	2021	6,000,000	7,000,000	172,800,000	86,400,000
202001-0003	Kab Tuban	2021	2,000,000	20,000,000	201,600,000	33,600,000
202001-0304	Kab Sidoarjo	2021	3,000,000	7,000,000	72,000,000	24,000,000
202001-0158	Kab Kediri	2021	3,000,000	3,000,000	151,200,000	50,400,000
202001-0179	Kab Ngawi	2021	10,000,000	20,000,000	33,600,000	6,720,000
202001-0072	Kab Bojonegoro	2021	4,500,000	150,000	8,400,000	3,360,000
202001-0334	Kab Pasuruan	2021	10,000,000	70,000,000	3,360,000,000	1,344,000,000
202001-0052	Kab Probolinggo	2021	5,500,000	15,000,000	24,000,000	14,400,000
202001-0216	Kab Sidoarjo	2021	8,000,000	12,000,000	662,400,000	86,400,000
202001-0213	Kab Lamongan	2021	7,000,000	10,000,000	67,200,000	33,600,000
202001-0320	Kota Surabaya	2021	2,000,000	20,000,000	134,400,000	33,600,000
total variabel		75				

Sumber: Direktorat SMI, DJPb, Kemenkeu, 2020 (Diolah peneliti)